

**KAUSALITAS PENERIMAAN, PENGELUARAN DAN PDRB PROVINSI
DI INDONESIA 2010-2019**

SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Salah Satu Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana
Ekonomi pada Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang*



Oleh :

ALNO SARDI PUTRA

NIM/ TM: 16060073/ 2016

**JURUSAN ILMU EKONOMI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
2021**

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

KAUSALITAS PENERIMAAN, PENGELUARAN DAN PDRB

PROVINSI DI INDONESIA 2010 - 2019

Nama : Alno Sardi Putra

TM/NIM : 2016/16060073

Jurusan : Ilmu Ekonomi

Keahlian : Ekonomi Publik

Fakultas : Ekonomi

Padang, Juni 2021

Mengetahui,

Ketua Jurusan Ilmu Ekonomi



Melti Roza Adri, S.E., M.E
NIP. 19830505 200604 2 001

Disetujui oleh:

Pembimbing



Drs. Alianis
NIP. 19591129 198602 1 001

HALAMAN PENGESAHAN LULUS UJIAN SKRIPSI

Dinyatakan Lulus Setelah Diuji di Depan Tim Penguji Skripsi

Jurusan Ilmu Ekonomi

Fakultas Ekonomi

Universitas Negeri Padang

KAUSALITAS PENERIMAAN, PENGELUARAN DAN PDRB PROVINSI

DI INDONESIA 2010 - 2019

Nama : Alno Sardi Putra

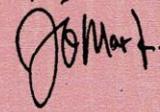
TM/NIM : 2016/16060073

Jurusan : Ilmu Ekonomi

Keahlian : Ekonomi Publik

Fakultas : Ekonomi

Padang, Juni 2021

Nomor	Jabatan	Nama	Tanda tangan
1	Ketua	Drs. Alianis, MS	1. 
2	Anggota	Melti Roza Adry, SE, M.Si	2. 
3	Anggota	Dr. Joan Marta, SE, M.Si	3. 

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Alno Sardi Putra
NIM/ Th. Masuk : 16060073 / 2016
Tempat / Tanggal Lahir : Padang / 11 Juli 1996
Jurusan : Ilmu Ekonomi
Keahlian : Ekonomi Publik
Fakultas : Ekonomi
Alamat : Jl bypass Aspol Lubeg No.11

No. Hp/Telephone : 082169003376
Judul Skripsi : Kausalitas Penerimaan, Pengeluaran dan PDRB
Provinsi di Indonesia 2010-2019

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Karya tulis/skripsi ini adalah hasil dan belum pernah di ajukan untuk memperoleh gelar akademik (sarjana) baik di UNP maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis/skripsi ini murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan tim pembimbing.
3. Pada karya tulis/skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain kecuali tertulis dengan jelas dicantumkan pada daftar pustaka.
4. Karya tulis/skripsi ini Sah apabila telah ditandatangani Asli oleh tim pembimbing, tim penguji dan ketua Jurusan.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran di dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar akademik yang telah diperoleh karena karya tulis/skripsi ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi.

Padang, Mei 2021

Penulis



Alno Sardi Putra

NIM: 16060073

ABSTRAK

Alno Sardi Putra (2016/16060073): Kausalitas Penerimaan, Pengeluaran dan PDRB Provinsi di Indonesia 2010 – 2019. Jurusan Ilmu Ekonomi Universitas Negeri Padang dengan Dosen Pembimbing Drs, Alianis, MS.

Tujuan penelitian ini adalah (1) untuk mengetahui hubungan kausalitas antara penerimaan pemerintah daerah dengan pengeluaran pemerintah daerah pada provinsi di Indonesia di wilayah barat. (2) untuk mengetahui hubungan kausalitas antara penerimaan pemerintah daerah dengan pengeluaran pemerintah daerah pada provinsi di Indonesia di wilayah timur. (3) untuk mengetahui hubungan kausalitas antara pengeluaran pemerintah daerah dengan PDRB pada provinsi di Indonesia wilayah barat. (4) untuk mengetahui hubungan kausalitas antara pengeluaran pemerintah daerah dengan PDRB pada provinsi di Indonesia di wilayah timur. (5) untuk mengetahui hubungan kausalitas antara penerimaan pemerintah daerah dengan PDRB pada provinsi di Indonesia di wilayah barat. (6) untuk mengetahui hubungan kausalitas antara penerimaan pemerintah daerah dengan PDRB pada provinsi di Indonesia wilayah timur.

Pada penelitian ini yang menjadi objek adalah 33 provinsi di seluruh Indonesia. Data yang digunakan dari tahun 2010 sampai dengan 2019. Data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) Metode analisis yang digunakan adalah pengujian clausality granger yang diolah dengan menggunakan Eviews.

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis ditemukan bahwa: (1) Terdapat hubungan kausalitas timbal balik antara penerimaan pemerintah daerah dengan pengeluaran pemerintah daerah pada provinsi di Indonesia di wilayah barat. Dengan demikian hipotesis di terima. (2) Terdapat hubungan kausalitas timbal balik antara penerimaan pemerintah daerah dengan pengeluaran pemerintah daerah pada provinsi di Indonesia di wilayah timur. Dengan demikian hipotesis di terima. (3) Tidak terdapat hubungan kausalitas antara pengeluaran pemerintah daerah dengan PDRB tetapi terdapat hubungan serah PDRB dengan pengeluaran pada 33 provinsi di Indonesia di wilayah barat. Dengan demikian hipotesis ditolak. (4) Tidak terdapat hubungan kausalitas antara pengeluaran pemerintah daerah dengan PDRB tetapi terdapat hubungan serah PDRB dengan pengeluaran pada provinsi di Indonesia di wilayah timur. Dengan demikian hipotesis ditolak. (5) Tidak terdapat hubungan kausalitas antara PDRB dengan penerimaan pemerintah daerah pada Provinsi di Indonesia wilayah barat. Akan tetapi terdapat hubungan satu arah antara penerimaan pemerintah dengan PDRB. Dengan demikian hipotesis ditolak. (6) Tidak terdapat hubungan kausalitas antara PDRB dengan penerimaan pemerintah daerah pada Provinsi di Indonesia wilayah timur. Akan tetapi terdapat hubungan satu arah antara penerimaan pemerintah dengan PDRB. Dengan demikian hipotesis ketiga ditolak.

Kata Kunci: Penerimaan Pemerintah, Pengeluaran Pemerintah & PDRB

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji dan syukur penulis sampaikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala rahmat dan karunia-Nya yang telah memberikan kemudahan pada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“KAUSALITAS PENERIMAAN, PENGELUARAN dan PDRB PROVINSI di INDONESIA 2010 - 2019”**. Skripsi ini merupakan salah satu syarat guna menyelesaikan pendidikan S-1 dan untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.

Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis tidak lepas dari bimbingan, arahan, dan motivasi dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Drs, Alianis, MS selaku dosen pembimbing yang telah banyak memberikan bimbingan dan ilmu kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Ibuk Melti Roza Adry, S.E, M.E selaku dosen penelaah yang telah memberikan banyak saran dan ilmu kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
3. Bapak Dr. Joan Marta, S.E, M.Si selaku dosen penguji yang telah memberikan banyak saran dan ilmu kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
4. Bapak Dr. Idris, M. Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.

5. Ibu Dewi, S.E, M.M selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
6. Kakak Asma Lidya, Amd (Kak Lid) yang selalu mengingatkan dan membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Bapak dan Ibu dosen serta karyawan/karyawati Jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
8. Bapak dan Ibu Staf Tata Usaha Fakultas Ekonomi dan Bapak ibu Staf Perpustakaan Fakultas Ekonomi yang telah membantu kelancaran penyelesaian skripsi ini.
9. Papa dan Mama yang selalu memberikan dukungan, motivasi, nasihat, dan doa kepada penulis sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini.
10. Kakak dan adik tersayang yang selalu memberikan dukungan, dan nasihat kepada penulis sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini.
11. Pacar, Ririn yang selalu menemani dan memotivasi penulis dari awal kuliah sampai sekarang.
12. Rekan - rekan seperjuangan Jurusan Ilmu Ekonomi angkatan 2016 tanpa terkecuali.
13. Semua pihak yang telah membantu penulis yang tidak dapat disebutkan satu-persatu.

Semoga bantuan, bimbingan, petunjuk, dan kerja sama yang diberikan tidaksia-sia dikemudian hari dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan imbalan yang berlipat ganda. Dalam hal ini penulis menyadari bahwa pengetahuan yang penulis miliki masih sangat terbatas, oleh karena itu penulis meminta maaf atas kekurangan dalam penulisan skripsi ini. Penulis berharap atas

saran dan kritikan positif dari banyak pihak demi kesempurnaan skripsi ini, penulis juga berharap skripsi ini bisa memberikan manfaat.

Padang, Juni 2021

Penulis

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR TABEL.....	viii
DAFTAR GAMBAR	ix
DAFTAR LAMPIRAN.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	9
BAB II KAJIAN TEORI, KERANGKA KONSEPTUAL, DAN HIPOTESIS	10
A. Kajian Teori	10
1. Desentralisasi Fiskal	10
2. Penerimaan Pemerintah.....	11
3. Pengeluaran Pemerintah	14
4. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).....	17
5. Kausalitas antara Penerimaan dan Pengeluaran Pemerintah	19
6. Kausalitas antara Pengeluaran Pemerintah dan PDRB	21
7. Kausalitas antara Penerimaan Pemerintah dan PDRB	23
B. Penelitian Terdahulu	25
C. Kerangka Konseptual.....	28
D. Hipotesis Penelitian	30
BAB III METODE PENELITIAN	31
A. Jenis Penelitian.....	31

B.	Tempat dan Waktu Penelitian	31
C.	Jenis Data dan Sumber Data	31
D.	Teknik Pengumpulan Data.....	32
E.	Defenisi Operasional.....	32
F.	Teknik Analisis Data.....	33
1.	Analisis Deskriptif	33
2.	Analisis Induktif	34
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....		36
A.	Gambaran Wilayah Penelitian	36
1.	Kondisi Geografis Indonesia.....	36
2.	Kondisi Demografis Indonesia.....	37
3.	Gambaran Perekonomian Indonesia	38
B.	Hasil penelitian	41
1.	Deskripsi Variabel Penelitian	41
2.	Hasil Pengujian <i>Stationer</i>	50
3.	Hasil Pengujian <i>Causality Granger</i>	50
C.	Pembahasan.....	54
1.	Hubungan Kausalitas Antara Penerimaan Pemerintah Dengan Pengeluaran Pemerintah pada Provinsi di Wilayah Indonesia Bagian Barat	54
2.	Hubungan Kausalitas Antara Penerimaan Pemerintah Dengan Pengeluaran Pemerintah pada Provinsi di Wilayah Indonesia Bagian Timur	56
3.	Hubungan Kausalitas Antara Penerimaan Pemerintah Dengan PDRB pada Provinsi di Wilayah Indonesia Bagian Barat.....	57
4.	Hubungan Kausalitas Antara Penerimaan Pemerintah Dengan PDRB pada Provinsi di Wilayah Indonesia Bagian Timur	59
5.	Hubungan Kausalitas Antara Pegeluaran Pemerintah Dengan PDRB pada Provinsi di Wilayah Indonesia Bagian Barat.....	60

6.Hubungan Kausalitas Antara Pegeluaran Pemerintah Dengan PDRB pada Provinsi di Wilayah Indonesia Bagian Timur	62
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	65
A. Kesimpulan	65
B. Saran	66
DAFTAR PUSTAKA	67

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Realisasi Penerimaan Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia Tahun 2016-2019	2
Tabel 2 Realisasi Pengeluaran Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia Tahun 2016-2019	4
Tabel 3 Penerimaan Perkapita Provinsi di Indonesia wilayah barat Tahun 2010 – 2019 (dalam ribuan)	42
Tabel 4 Penerimaan Perkapita Provinsi di Indonesia wilayah timur Tahun 2010 – 2019 (dalam ribuan)	43
Tabel 5 Pengeluaran Perkapita Provinsi di Indonesia Wilayah Barat Tahun 2010 – 2019 (dalam ribuan)	44
Tabel 6 Pengeluaran Perkapita Provinsi di Indonesia wilayah timur Tahun 2010 – 2019 (dalam ribuan)	46
Tabel 7 PDRB Perkapita Provinsi di Indonesia Wilayah Barat Tahun 2010 – 2019 (dalam ribuan)	48
Tabel 8 PDRB Perkapita Provinsi di Indonesia Wilayah Timur Tahun 2010 – 2019 (dalam ribuan)	49
Tabel 9 Hasil Pengujian <i>Stationer Audmented Dickey Fuller</i> (ADF).....	50
Tabel 10 Hasil Pengujian <i>Causality Granger</i> Wilayah Barat	51
Tabel 11 Hasil Pengujian <i>Causality Granger</i> Wilayah Timur	53

DAFTAR GAMBAR

Gambar Kerangka Konseptual 1	30
------------------------------------	----

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Penerimaan Perkapita Provinsi di Indonesia Wilayah Barat Tahun 2010 – 2019 (dalam ribuan)	72
Lampiran 2 Penerimaan Perkapita Provinsi di Indonesia Wilayah Timur Tahun 2010 – 2019 (dalam ribuan)	73
Lampiran 3 Pengeluaran Perkapita Provinsi di Indonesia Wilayah Barat Tahun 2010 – 2019 (dalam ribuan)	74
Lampiran 4 Pengeluaran Perkapita Provinsi di Indonesia Wilayah Timur Tahun 2010 – 2019 (dalam ribuan)	75
Lampiran 5 PDRB Perkapita Provinsi di Indonesia Wilayah Barat Tahun 2010 – 2019 (dalam ribuan)	76
Lampiran 6 PDRB Perkapita Provinsi di Indonesia Wilayah Timur Tahun 2010 – 2019 (dalam Ribuan).....	77
Lampiran 7 Uji Stasioner Wilayah Barat	78
Lampiran 8 Uji <i>Causality Granger</i> Wilayah Barat.....	79
Lampiran 9 Uji Stasioner Wilayah Timur	80
Lampiran 10 Uji <i>Causality Granger</i> Wilayah Timur	81

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam perekonomian modern, pemerintah merupakan salah satu pelaku ekonomi yang memiliki peranan penting. Selain pemerintah memiliki kekuatan dan kemampuan untuk mengatur dan mengawasi roda perekonomiannya, pemerintah juga mampu melaksanakan kegiatan-kegiatan ekonomi yang tidak dapat dilaksanakan oleh pelaku ekonomi lainnya, seperti pelaku ekonomi di sektor swasta dan pelaku ekonomi di sektor rumah tangga. Sehingga, campur tangan pemerintah sangat dibutuhkan di dalam suatu perekonomian dan untuk kegiatan-kegiatan yang menyangkut pertumbuhan ekonomi.

Tingkat pertumbuhan ekonomi yang ingin dicapai dalam upaya pembangunan dapat terwujud jika jumlah fisik barang dan jasa yang dihasilkan dalam suatu perekonomian meningkat di setiap tahunnya. Anggaran belanja merupakan salah satu instrumen kebijakan fiskal pemerintah yang dapat mempengaruhi pertumbuhan perekonomian. Rozalinda (2015) menyatakan bahwa kebijakan fiskal merupakan kebijakan oleh pemerintah dalam mengatur pemerintahannya baik penerimaan maupun pengeluaran negara dalam menjaga stabilitas ekonomi dengan tujuan mendorong pertumbuhan ekonomi.

Timbulnya suatu proses distribusi anggaran kepada daerah sebagai konsekuensi penyerahan ataupun pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, sesuai dengan prinsip *money follows function* merupakan akibat adanya desentralisasi fiskal. Pemerintah daerah diberikan sumber-sumber pendanaan serta wewenang untuk membelanjakan dana tersebut

sesuai dengan kebutuhan dan prioritas daerah merupakan suatu bentuk desentralisasi fiskal.

Sistem desentralisasi fiskal telah berkembang di banyak negara, baik negara berkembang maupun negara maju. Secara umum, desentralisasi fiskal terbagi menjadi dua bagian, diantaranya sisi pengeluaran dan sisi penerimaan. Pada sisi pengeluaran, daerah berhak menentukan alokasi belanja daerah. Hal ini karena pemerintah daerah dianggap lebih mengetahui kebutuhan masyarakat daerah tersebut (Lessmann and Markwardt, 2012). Pada sisi penerimaan, daerah mendapatkan sumber penerimaan untuk membiayai belanja daerahnya. Salah satu implementasi utama dari teori ekonomi dan politik pada desentralisasi fiskal adalah mencapai otonomi suatu daerah dengan memperbesar pajak daerah daripada tingkat transfer pemerintah pusat. Oleh sebab itu, transfer yang diberikan pemerintah pusat kepada daerah dialokasikan setelah daerah mengusahakan peningkatan asli daerah mereka.

Tabel 1
Realisasi Penerimaan Pemerintah Provinsi Seluruh
Indonesia Tahun 2016-2019

Jenis Penerimaan	Realisasi Penerimaan Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia Menurut Jenis Penerimaan (Ribu Rupiah)			
	2016	2017	2018	2019
PENDAPATAN DAERAH	275,571,195,995	323,493,250,792	335,585,811,291	357,559,640,616
Pendapatan Asli Daerah	133,179,011,317	149,307,806,874	158,721,480,199	169,993,478,633
Pajak Daerah	112,689,762,824	125,806,425,501	136,095,291,940	144,039,477,959
Retribusi Daerah	1,875,861,563	1,730,752,091	1,581,850,373	1,773,258,727
Hasil Perusahaan Milik Daerah & Pengelolaan	3,158,771,341	3,460,154,777	3,647,165,336	4,265,866,248
Lain-lain PAD yang Sah	15,454,615,589	18,310,474,505	17,397,172,550	19,914,875,699
Dana Perimbangan	113,733,211,865	149,297,354,493	152,285,491,118	159,262,926,416
Bagi Hasil Pajak	22,178,206,076	26,118,682,296	24,672,298,504	19,350,728,359
Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	8,488,357,513	7,416,668,470	10,457,854,069	14,976,063,612
Dana Alokasi Umum	38,538,077,004	55,763,530,032	56,606,500,497	58,691,805,994
Dana Alokasi Khusus	44,528,571,272	59,998,473,695	60,548,838,048	66,244,328,451
Lain-lain Pendapatan yang Sah	28,658,972,813	24,888,089,425	24,578,839,974	28,303,235,567
PEMBIAYAAN DAERAH	22,279,863,464	26,118,294,258	35,358,712,123	38,495,945,337
JUMLAH	297,851,059,459	349,611,545,050	370,944,523,414	396,055,585,953

Sumber: Badan Pusat Statistik 2019

Berdasarkan data pada tabel 1 dapat kita lihat realisasi penerimaan PAD Provinsi se-Indonesia. Penerimaan daerah yang berasal dari pendapatan daerah dari tahun ketahun semakin meningkat. Pada tahun 2017 meningkat tinggi sebesar 17,39% dari tahun 2016, tahun 2018 meningkat sebesar 3,73% dari tahun 2017, dan tahun 2019 mengalami peningkatan sebesar 6,54% dari tahun 2018. Akan tetapi, peningkatan tersebut tidak diikuti dengan perkembangan lain-lain pendapatan yang sah. Lain-lain pendapatan yang sah tahun 2017 menurun yang cukup banyak sebesar 13,15% dari tahun 2016, tahun 2018 mengalami penurunan lagi sebesar 1,24% dari tahun 2017, dan tahun 2019 mengalami kenaikan lagi sebesar 15,15% dari tahun 2018.

Penerimaan daerah yang berasal dari pendapatan daerah setiap tahunnya semakin meningkat. Peningkatan ini diikuti dengan peningkatan penerimaan daerah yang berasal dari dana perimbangan. Penerimaan daerah yang berasal dari Pendapatan asli daerah (PAD) mengalami peningkatan, tetapi tidak setajam peningkatan penerimaan daerah yang berasal dari dana perimbangan. Artinya, peran pemerintah pusat sangat penting bagi pembiayaan pembangunan daerah. Adi (2008) menyatakan bahwa proporsi Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap penerimaan suatu daerah masih tertinggi dibandingkan dengan penerimaan daerah yang lainnya.

Tingginya peranan transfer dari pemerintah pusat dan rendahnya PAD menunjukkan masih rendahnya derajat desentralisasi fiskal. Padahal misi desentralisasi fiskal mengindikasikan bahwa pemerintah daerah didorong untuk meningkatkan peran pendapatan asli daerah sebagai sumber pembiayaan belanja daerah. Menurut prinsip efisiensi nasional, daerah didorong untuk meningkatkan

peran pajak dari jenis pajak yang telah diciptakan pemerintah tanpa menambah jenis pajak baru sesuai dengan Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 menyatakan bahwa pemerintah kota ataupun kabupaten harus menetapkan jenis pajak yang telah di atur dalam peraturan pemerintah. Artinya, pemerintah daerah diharapkan lebih mandiri terutama dalam hal menggali dan meningkatkan potensi sumber daya keuangan daerah.

Tabel 2
Realisasi Pengeluaran Pemerintah Provinsi Seluruh
Indonesia Tahun 2016-2019

Jenis pengeluaran	Realisasi Pengeluaran Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia Menurut Jenis Pengeluaran (Ribu Rupiah)			
	2016	2017	2018	2019
BELANJA TIDAK LANGSUNG	157,921,957,110	186,536,045,056	198,762,528,445	214,231,884,921
Belanja Pegawai	41,420,506,302	72,476,771,769	80,186,823,671	81,825,017,957
Belanja Bunga	55,672.199	69,081,721	76,936,258	130,660,326
Belanja Subsidi	947,977,814	1,488,695,545	2,875,010,245	2,943,410,333
Belanja Hibah	53,831,992,474	46,837,931,355	51,941,417,069	50,757,433,632
Belanja Bantuan Sosial	3,404,874,370	4,129,602,807	4,964,332,883	5,272,782,583
Belanja Bagi Hasil	35,733,513,393	40,014,393,679	40,947,409,860	50,938,535,053
Belanja Bantuan Keuangan	22,456,736,129	21,324,385,632	17,650,132,579	22,253,246,109
Pengeluaran Tidak Terduga	61,684,429	195,182,548	120,456,880	110,798,928
BELANJA LANGSUNG	106,176,521,472	120,503,128,406	127,666,766,106	140,591,613,847
Belanja Pegawai	7,366,638,255	8,365,461,416	5,845,447,878	9,340,178,273
Belanja Barang dan Jasa	54,033,172,998	64,809,070,337	70,299,080,025	80,685,343,512
Belanja Modal	44,776,710,219	47,328,596,653	51,522,238,203	50,566,092,062
PEMBIAYAAN DAERAH	33,752,580,877	42,572,371,588	44,515,228,863	41,232,087,185
JUMLAH	297,851,059,459	349,611,545,050	370,944,523,414	396,055,585,953

Sumber: Badan Pusat Statistik 2019

Tabel 2 menunjukkan bahwa setiap pos pengeluaran mengalami peningkatan. Pada 2017 mengalami peningkatan pengeluaran yang sangat tajam sebesar 17,38% dari tahun 2016, pada 2018 mengalami peningkatan pengeluaran sebesar 6,10% dari tahun 2017, dan tahun 2019 mengalami peningkatan sebesar 6,77% dari tahun 2018. Rata-rata peningkatan pengeluaran sebesar 10,08%. Peningkatan pengeluaran disebabkan karena adanya peningkatan di setiap pos pengeluaran, baik peningkatan pada pos belanja maupun pos pembiayaan daerah. Selain itu, peningkatan pengeluaran juga dipengaruhi oleh peningkatan dana transfer dari pemerintah pusat sebagai salah satu sumber penerimaan daerah. Hal

ini membuktikan bahwa transfer pemerintah pusat mendorong adanya peningkatan belanja, kondisi tersebut memungkinkan terjadinya peningkatan PRDB daerah

Mengacu pada data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik Nasional diperoleh informasi PDRB dari tahun 2016 sampai tahun 2019 mengalami peningkatan. Tahun 2017 mengalami peningkatan sebesar 5,23% dari tahun 2016, tahun 2018 mengalami kenaikan dari tahun 2017 sebesar 5,32%, dan tahun 2019 mengalami kenaikan dari tahun 2018 sebesar 4,99%. Rata-rata peningkatan PDRB dari tahun 2016 sampai tahun 2019 sebesar 5,18%. Hal ini berarti peningkatan PDRB dimungkinkan dipengaruhi oleh peningkatan pengeluaran.

Sesuai dengan uraian diatas menunjukkan terjadinya ketidakefektifan desentralisasi fiskal. Ketidakefektifan tersebut terlihat dari pengeluaran daerah sebagian besar masih didanai oleh transfer dari pemerintah pusat. Pada kenyataannya, desentralisasi fiskal telah dimulai sejak 25 April 1995 melalui uji coba otonomi daerah di 26 kabupaten/kota di seluruh provinsi (kecuali provinsi DKI Jakarta).

Hubungan antara penerimaan dan pengeluaran pemerintah sangat menarik perhatian para ekonom dalam beberapa tahun. Menurut sisi teoritis, terdapat beberapa hipotesis yang telah dikembangkan untuk menjelaskan hubungan kausalitas antara penerimaan pemerintah dengan pengeluaran pemerintah. Hipotesis pertama “penerimaan-pengeluaran” yang menunjukkan bahwa jika terjadi perubahan penerimaan maka menyebabkan perubahan pengeluaran. Hipotesis ini dikembangkan oleh Friedman yang beranggapan bahwa dengan adanya peningkatan penerimaan pemerintah menyebabkan peningkatan pengeluaran pemerintah sehingga defisit anggaran akan terus terjadi. Hipotesis

kedua “pengeluaran-penerimaan” yang menunjukkan bahwa perubahan pengeluaran yang ada pada pemerintah akan menyebabkan peningkatan penerimaan daerah, dengan hubungan kausalitas yang dimulai dari pengeluaran menuju penerimaan. Menurut Ali dan Syah (2012) menyatakan bahwa pemerintah terlebih dahulu harus meningkatkan pengeluaran, kemudian baru meningkatkan penerimaan. Hipotesis ketiga “sinkronisasi fiskal” yang menekankan bahwa keputusan penerimaan pemerintah daerah tidak akan terlepas dari keputusan pengeluaran pemerintah. Al-Zeaud (2015), Elyasi dan Rahimi (2012), Mehrara, Pahlavani, dan Elyasi (2011) menunjukkan bahwa terdapat hubungan kausalitas dua arah antara penerimaan dan pengeluaran pemerintah. Akan tetapi bertentangan dengan hasil penelitian Sahed, Mékidiche, dan Kahoui (2020), Mehrara dan Rezaei (2014), dan Eita dan Mbazima (2008) yang menyatakan bahwa hanya terdapat hubungan kausal searah antara penerimaan dan pengeluaran pemerintah yang berjalan dari penerimaan menuju pengeluaran pemerintah. Sedangkan menurut penelitian Ali dan Syah (2012), dan Anne Sere dan Choga (2017) menunjukkan bahwa tidak terdapat hubungan kausalitas jangka panjang ataupun pendek antara penerimaan pemerintah dan pengeluaran pemerintah.

Menurut pendekatan Wagner, kausalitas antara pengeluaran dan PDRB berjalan dari peningkatan PDRB ke pengeluaran daerah. Sedangkan menurut pendekatan Keynesian dalam “*General Theory of Employment*”, kausalitas berjalan dari pengeluaran daerah menuju peningkatan PDRB terutama selama masa resesi. Abu-Eideh (2015) menunjukkan bahwa terdapat hubungan kausalitas dua arah antara pengeluaran pemerintah dengan PDRB. Akan tetapi bertentangan dengan penelitian Baniata, Economies, and Al-waked (2017) yang menyatakan

hanya terdapat hubungan kausalitas jangka pendek yang berjalan dari PDRB menuju pengeluaran pemerintah.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Rori *et al.* (2016) menyatakan bahwa peningkatan pendapatan asli suatu daerah akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah tersebut juga. Namun, hasil tersebut bertentangan dengan hasil penelitian Parmawati (2010) bahwa tidak ditemukannya hubungan kausalitas antara penerimaan suatu daerah dengan PDRB.

Berdasarkan uraian fenomena serta adanya pro dan kontra hasil penelitian terdahulu serta terus terjadinya perubahan penerimaan, pengeluaran dan PDRB daerah daerah di Indonesia mendorong peneliti tertarik untuk mencoba membuat sebuah penelitian empiris yang berjudul: **Kausalitas Penerimaan, Pengeluaran dan PDRB Provinsi di Indonesia 2010-2019.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas yang telah dijelaskan sebelumnya, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana hubungan kausalitas antara penerimaan pemerintah daerah dengan pengeluaran pemerintah daerah pada provinsi di wilayah barat Indonesia?
2. Bagaimana hubungan kausalitas antara penerimaan pemerintah daerah dengan pengeluaran pemerintah daerah pada provinsi di wilayah timur Indonesia?
3. Bagaimana hubungan kausalitas antara pengeluaran pemerintah daerah dengan PDRB pada provinsi di wilayah barat Indonesia?

4. Bagaimana hubungan kausalitas antara pengeluaran pemerintah daerah dengan PDRB pada provinsi di wilayah timur Indonesia?
5. Bagaimana hubungan kausalitas antara penerimaan pemerintah daerah dengan PDRB pada provinsi di wilayah barat Indonesia?
6. Bagaimana hubungan kausalitas antara penerimaan pemerintah daerah dengan PDRB pada provinsi di wilayah timur Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan diatas, maka tujuan dari penelitian ini untuk:

1. Mengetahui bagaimana hubungan kausalitas antara penerimaan pemerintah daerah dengan pengeluaran pemerintah daerah pada provinsi di wilayah barat Indonesia.
2. Mengetahui bagaimana hubungan kausalitas antara penerimaan pemerintah daerah dengan pengeluaran pemerintah daerah pada provinsi di wilayah timur Indonesia.
3. Mengetahui bagaimana hubungan kausalitas antara pengeluaran pemerintah daerah dengan PDRB pada provinsi di wilayah barat Indonesia.
4. Mengetahui bagaimana hubungan kausalitas antara pengeluaran pemerintah daerah dengan PDRB pada provinsi di wilayah timur Indonesia.
5. Mengetahui bagaimana hubungan kausalitas antara penerimaan pemerintah daerah dengan PDRB pada provinsi di barat Indonesia.

6. Mengetahui bagaimana hubungan kausalitas antara penerimaan pemerintah daerah dengan PDRB pada provinsi di timur Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah:

1. Bagi penulis
 - a. Menambah pengetahuan penulis mengenai penerimaan pemerintah, pengeluaran pemerintah dan PDRB.
 - b. Membandingkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan secara teori dan praktik.
2. Bagi Objek Penelitian
 - a. Memberikan informasi bagi pihak pembuat kebijakan, agar tercapainya tujuan perekonomian.
3. Bagi Perguruan Tinggi
 - a. Tambahan literatur akademis dan referensi untuk melakukan penelitian selanjutnya.

BAB II

KAJIAN TEORI, KERANGKA KONSEPTUAL, DAN HIPOTESIS

A. Kajian Teori

1. Desentralisasi Fiskal

Desentralisasi fiskal merupakan suatu proses distribusi anggaran yang diberikan oleh tingkat pemerintahan yang lebih tinggi kepada pemerintahan yang lebih rendah guna mendukung fungsi atau tugas pemerintahan yang dilimpahkan (Khusnaini dalam Kresnandra 2016). Ketika membahas desentralisasi fiskal secara umum, terdapat tiga variabel yang sering digunakan, yaitu desentralisasi pengeluaran, desentralisasi pengeluaran pembangunan, desentralisasi penerimaan.

Mardiasmo (2009) menyatakan bahwa terdapat prinsip-prinsip dan tujuan dari implementasi desentralisasi fiskal, yaitu:

- a. Mengurangi kesenjangan fiskal yang terjadi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah (*vertical fiscal imbalance*) dan kesenjangan fiskal antar daerah (*horizontal fiscal imbalance*).
- b. Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang ada di daerah.
- c. Meningkatkan efisiensi sumber daya nasional.
- d. Menciptakan tata kelola pemerintah yang transparan dan akuntabel dalam pelaksanaan kegiatan pengalokasian transfer daerah yang tepat sasaran.
- e. Mendukung kesinambungan fiskal yang terdapat dalam kebijakan ekonomi makro.

Menurut Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah 2004 Pasal 1, desentralisasi fiskal merupakan penyerahan wewenang yang dilakukan

pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menurut Oates dalam Martinez *et al.* 2015 terdapat hubungan antara desentralisasi fiskal dengan pertumbuhan ekonomi. Ia membagi dua aliran hubungan desentralisasi fiskal dengan pertumbuhan ekonomi. Aliran pertama menurut Oates dan Tiebout, pelayanan publik dapat dihasilkan secara efisien jika adanya desentralisasi fiskal. Pendekatan ini menggunakan rasio pengeluaran, pendapatan, dan penerimaan pajak pemerintah daerah terhadap PDB. Hal ini dapat ditangani dalam konteks pengetahuan.

Lessmann and Markwardt (2012) menyatakan bahwa adanya kemungkinan bahwa pemerintah daerah memiliki pengetahuan yang lebih banyak mengenai kebutuhan dasar daerah tersebut. Sedangkan aliran kedua menurut Rodriguez, Pose, and Ezcurra (2010) pengetahuan menjadi sangat penting ketika mengembangkan hubungan antara desentralisasi fiskal dengan pertumbuhan ekonomi. Pendekatan ini menggunakan rasio belanja pemerintah daerah dengan total belanja publik, rasio pendapatan pemerintah daerah dengan total pendapatan publik, dan rasio pendapatan pajak pemerintah daerah terhadap total pendapatan pajak publik.

2. Penerimaan Pemerintah

Menurut Peraturan Pemerintah No 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, penerimaan pemerintah daerah adalah seluruh uang yang masuk ke dalam kas daerah. Sedangkan menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ayat (1) penerimaan daerah terdiri atas pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan.

Pendapatan daerah merupakan hak milik pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih daerah itu sendiri. Sedangkan penerimaan pembiayaan adalah seluruh penerimaan yang harus dibayar kembali oleh daerah atau pengeluaran yang akan diterima daerah itu kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun anggaran berikutnya.

a. Pendapatan Daerah

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 21 menyebutkan bahwa pendapatan daerah terdiri atas pendapatan asli daerah (PAD), dana perimbangan dan lain – lain pendapatan yang sah. Berdasarkan Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah pasal 1 angka 18 menyatakan bahwa pendapatan asli daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pendapatan asli daerah sebagai semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. Pendapatan ini bersumber dari empat jenis pemasukan, seperti pajak daerah, retribusi daerah, pengelolaan kekayaan yang dipisah, dan pendapatan sah lain-lain (Halim 2014).

Pemerintah daerah dalam melaksanakan kewenangan daerah, menerima bantuan dari pemerintah pusat dalam bentuk transfer. Transfer pemerintah pusat merupakan pengalihan pendapatan fiskal dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah, yang memainkan peran penting dalam menentukan tingkat disparitas sosial sehingga dalam jangka panjang dapat mengembangkan perekonomian Negara (Adi 2008). Transfer pemerintah pusat terdiri atas dana bagi hasil, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus. Menurut Undang-Undang No. 33 Tahun

2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah menyatakan bahwa dana bagi hasil adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan ke pemerintah daerah dalam mewujudkan desentralisasi. Sedangkan dana alokasi umum adalah dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah dengan tujuan pemerataan keuangan antar daerah dan mewujudkan desentralisasi. Sedangkan dana alokasi khusus adalah dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan membantu untuk mendanai kegiatan khusus yang sesuai dengan prioritas nasional.

b. Penerimaan Pembiayaan

Menurut Permendagri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah pasal 60, Penerimaan Pembiayaan terdiri dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya (SiLPA), pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, Penerimaan pinjaman daerah, dan penerimaan piutang daerah. Menurut Permendagri Nomor 52 tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016, SiLPA atas sisa penerimaan dana alokasi khusus yang tidak terpakai tahun sebelumnya bisa digunakan untuk kegiatan fisik untuk tahun berikutnya dan menurut Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah bahwa pencairan dana cadangan digunakan untuk pembangunan daerah sesuai yang ditetapkan Perda dan penerimaan piutang daerah bisa digunakan untuk belanja daerah.

Penerimaan pembiayaan terdiri dari:

- 1) Pencairan dana cadangan
- 2) Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan
- 3) Penerimaan pinjaman daerah.

3. Pengeluaran Pemerintah

Fuadi (2008) menyatakan bahwa pengeluaran pemerintah adalah seluruh pengeluaran kas daerah yang terdapat dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang mengurangi kekayaan pemerintah daerah. Pengeluaran pemerintah merupakan salah satu instrument kebijakan fiskal. Berdasarkan kinerja dalam struktur anggaran pemerintah daerah, pengeluaran daerah dibagi menjadi pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan. Pengeluaran rutin merupakan pengeluaran pemerintah yang dilakukan secara rutin atau konsumtif, hal ini karena pengeluaran rutin memiliki masa manfaat hanya satu tahun anggaran dan tidak dapat menambah asset atau kekayaan daerah, sedangkan pengeluaran pembangunan adalah pengeluaran pemerintah yang memiliki sifat produktif, hal ini karena pengeluaran pembangunan digunakan untuk membiayai sektor-sektor produktif yang dapat menambah kekayaan suatu daerah.

Bailey (2011) pengeluaran pemerintah (*government expenditure*) merupakan total pengeluaran pemerintah yang ditujukan untuk berbagai kegiatan baik untuk kepentingan pemerintah itu sendiri atau pun untuk publik atau masyarakat. Pemerintah pada setiap negara tentu merencanakan pengeluaran untuk kegiatan publik. Dimana pengeluaran untuk kegiatan publik tersebut dapat dikelompokkan menjadi dua bentuk yaitu:

a) *Exhaustive Expenditure*

Merupakan total pengeluaran pemerintah untuk pembelian perangkat dan fasilitas yang dibutuhkan pemerintah termasuk untuk kegiatan produk barang yang dibutuhkan pemerintah serta pengembangan sektor swasta yang berada dalam pengawasan pemerintah langsung.

b) *Transfer Payment / Expenditure*

Dalam konsep ini pemerintah tidak mengeluarkan biaya tunai akan tetapi biaya tersebut ditransfer dari pembayaran pajak kepenerima misalnya mereka yang menerima hadiah untuk mendukung investasi untuk daerah yang mengalami penurunan ekonomi, selain itu transfer payment juga berkaitan dengan subsidi, hibah yang digunakan pemerintah untuk pengembangan sektor ekonomi disebuah daerah.

Pengeluaran pemerintah dalam artian riil dapat digunakan sebagai indikator untuk menentukan besarnya kegiatan pemerintah yang dibiayai oleh pengeluaran pemerintah tersebut dan bagaimana proporsinya terhadap penerimaan daerah. Semakin banyak daerah mengadakan kegiatan maka semakin besar pula pengeluaran pemerintah bersangkutan.

Green Paper (1984) dalam Bailey (2011) menyatakan bahwa kondisi keuangan dapat menentukan pengeluaran bagi pemerintah. Kondisi keuangan akan membuat pemerintah mencoba merencanakan anggaran yang mereka miliki sebelum di belanjakan. Salah satu pengeluaran yang dikeluarkan pemerintah ditujukan untuk pelayanan publik seperti pendidikan dan kesehatan. Oleh karena itu, perencanaan pengeluaran publik difokuskan pada tingkat input yang dibutuhkan untuk menyediakannya. Sedangkan volume layanan sektor publik yang

diinginkan adalah pasti dipengaruhi oleh kemampuan ekonomi yang diperkirakan mampu, penekanannya adalah pada pengeluaran riil (bukan uang tunai). Publik pengeluaran secara efektif dikaitkan dengan indeks, penyesuaian otomatis sedang dilakukan dibuat dengan memperhitungkan inflasi selama bertahun-tahun (sebanyak lima) antara rencana awal dan penyampaian layanan yang sebenarnya.

Pemerintah menyatakan bahwa negara harus putuskan dulu apa yang bisa dan harus dibeli dan kemudian tentukan pengeluaran rencana untuk program individu yang konsisten dengan keputusan itu. Faktanya pengeluaran umum pemerintah telah meningkat selama tahun 1960-an dan 1970-an terlepas dari upaya berulang dari pemerintah berturut-turut untuk menahannya. 'Batas uang tunai' telah diperkenalkan oleh Buruh sebelumnya pemerintah pada tahun 1976 dan diperketat di bawah pemerintahan Konservatif selama tahun 1980-an. Karenanya dirasakan perlu untuk menahan pengeluaran public tidak hanya didorong oleh ideologi. Ini juga bukan keasyikan dengan public pengendalian pengeluaran khas Inggris. Itu umum di kalangan mahir negara industri.

Dalam hal ini terdapat kategori pengeluaran pemerintah secara langsung dan tidak langsung. Pengeluaran pemerintah langsung (*exhaustive expenditure*) yaitu pengeluaran yang dilakukan pemerintah untuk membeli produk yang mereka butuhkan atau melakukan pemenuhan kebutuhan publik yang paling esensial. Pengeluaran tersebut dilakukan secara terus menerus setiap tahunnya sehingga terkadang mendorong kebosanan karena meningkatkan beban pengeluaran pemerintah.

Sedangkan pengeluaran pemerintah tidak langsung (*non exhaustive expenditure*) berkaitan dengan pengeluaran pemerintah yang bersumber dari dana

yang berasal dari pembayaran hutang oleh debitur, hibah, dana transfer dan sebagainya. Dana tersebut dialokasikan untuk kepentingan publik dan sektor usaha strategis yang dibiayai pemerintah.

Menurut Sukirno (2004) pengeluaran pemerintah yaitu untuk membiayai administrasi pemerintahan dan sebagian lainnya adalah untuk membiayai kegiatan-kegiatan pembangunan. Beberapa bidang penting yang akan dibiayai pemerintah adalah membayar gaji pegawai-pegawai pemerintah, membiayai sistem pendidikan dan kesehatan rakyat, membiayai perbelanjaan untuk angkatan bersenjata, dan membiayai berbagai jenis infrastruktur yang penting artinya dalam pembangunan. Pembelanjaan-pembelanjaan tersebut akan meningkatkan pengeluaran agregat dan mempertinggi tingkat kegiatan ekonomi negara.

4. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Pertumbuhan ekonomi dapat juga diartikan sebagai kenaikan *Gross Domestic Product* (GDP) atau *Gross National Product* (GNP) tanpa memandang apakah kenaikan itu lebih besar atau lebih kecil dari tingkat pertumbuhan penduduk, atau apakah perubahan struktur ekonomi terjadi atau tidak Wullur, Koleangan, and Niode (2019). *Gross domestic product* merupakan keseluruhan barang dan jasa yang dihasilkan oleh warga negara dalam suatu periode.

Didalam mengukur pertumbuhan ekonomi hal pertama yang diamati adalah *gross domestic product* dapat diamati dari nilai *output* atau nilai tambah yang mampu dihasilkan warga negara pada suatu periode. Dalam penghitungan nilai tambah merupakan nilai produksi (*output*) dapat dikurangi biaya antara. Nilai tambah bruto mencakup didalam komponen-komponen pendapatan faktor (upah dan gaji, bunga, sewa tanah dan keuntungan), dalam penyusutan dan pajak tidak

langsung menjadi neto. Di dalam menjumlahkan nilai tambah bruto dari masing-masing sektor dan menjumlahkan nilai tambah bruto dari seluruh sektor tadi, akan diperoleh *Produk Domestik Regional Bruto*.

Jika terjadi peningkatan PDRB maka akan berdampak kepada peningkatan kegiatan ekonomi, dapat dilihat disektor riil dan dunia usaha pada umumnya. Peningkatan kegiatan ekonomi akan membawa pengaruh besar dalam meningkatkan penerimaan pemerintah melalui pendapatan pajak, karena bergairahnya perekonomian sehingga aktivitas dunia usaha meningkat dan pada akhirnya keuntungan dalam perusahaan meningkat . Peningkatan aktivitas dan keuntungan perusahaan ini tentunya akan meningkatkan pemungutan pajak baik dari pajak penghasilan, pertambahan nilai maupun cukai.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu indikator keberhasilan dari pelaksanaan pembangunan yang dapat digunakan sebagai tolak ukur secara makro dalam pertumbuhan ekonomi. Nilai yang ditambahkan dari kombinasi faktor produksi dan bahan baku dalam proses produksi.. Menurut Todaro (2002) PDRB adalah nilai total atas segenap *output* akhir yang dihasilkan oleh suatu perekonomian di tingkat daerah (baik itu yang dilakukan oleh penduduk daerah maupun penduduk dari daerah lain yang bermukim di daerah tersebut). Budiharsono (2013) menyatakan bahwa *Produk Domestik Regional Bruto* (PDRB) adalah jumlah nilai tambah dari seluruh unit usaha yang ada dalam suatu wilayah atau jumlah yang dihasilkan dari seluruh nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh pihak ekonomi di suatu wilayah. Semakin tinggi pertumbuhan ekonomi yang dihasilkan suatu wilayah menandakan semakin baik kegiatan perekonomian di wilayah tersebut. Todaro and Smith (2011) menyatakan

bahwa pertumbuhan ekonomi di wilayah dapat dilihat dari laju pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan. Ketika pertumbuhan ekonomi semakin meningkat maka produksi jasa ataupun barang yang dihasilkan juga meningkat, dan dapat menyerap tenaga kerja dalam jumlah yang banyak.

5. Kausalitas antara Penerimaan dan Pengeluaran Pemerintah

Hubungan kausal antara penerimaan pemerintah dan pengeluaran pemerintah merupakan subjek penting dalam ekonomi publik terutama untuk pengendalian defisit anggaran. Defisit anggaran sangat berdampak terhadap perekonomian. Apabila terjadi keseimbangan fiskal seperti itu, akan berdampak pada menurunnya tabungan nasional dan pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, jika terjadi penurunan defisit fiskal melalui penurunan pengeluaran pemerintah atau peningkatan penerimaan pemerintah akan mendorong terjadinya pertumbuhan ekonomi, Petanlar dan Sadeghi (2012).

Menurut Buchanan dan Wagner (1978) hubungan penerimaan pemerintah dan pengeluaran pemerintah terjadi melalui peningkatan pajak, ketika pajak dinaikkan akan mendorong pertumbuhan ekonomi dalam pembelanjaan pemerintah dengan demikian, pemerintah akan membelanjakan seluruh pendapatannya, kenaikan belanja pemerintah akan menyebabkan pengeluaran pemerintah semakin tinggi. Hubungan antara penerimaan dan pengeluaran pemerintah menjadi penentu apakah keuangan negara mengalami defisit atau surplus dan menjadi acuan untuk mengambil kebijakan fiskal oleh pemerintah. Peningkatan penerimaan pemerintah selalu berhubungan negatif dengan pengeluaran pemerintah. Penerimaan pemerintah dari sektor pajak menjadi sumber utama dalam pembiayaan pengeluaran pemerintah dalam kegiatan

perekonomian, penerimaan pemerintah juga sebagai cadangan devisa negara untuk menstabilkan nilai tukar.

Ginting (2010) dalam penelitiannya menemukan bahwa penerimaan pemerintah dan pengeluaran pemerintah memiliki hubungan searah, dimana semakin tinggi penerimaan pemerintah akan mendorong jumlah pengeluaran yang lebih besar. Dengan demikian peneliti menyimpulkan bahwa terjadi hubungan positif antara penerimaan pemerintah dengan pengeluaran pemerintah.

Hasil penelitian Rahayu dan Rahmad (2019) yang menemukan bahwa pengeluaran pemerintah yang dialokasikan secara terencana untuk membiayai berbagai sektor produktif akan mendorong meningkatnya penerimaan pemerintah. Penelitian lainnya yang sejalan juga diperoleh oleh Setyawan (2017) menemukan pengeluaran pemerintah berpengaruh positif terhadap penerimaan pemerintah. Selanjutnya hasil penelitian yang dikukan oleh Rizki, Sinta, dan Atmono (2019) yang menemukan semakin baik perencanaan pengeluaran pemerintah akan memberikan hasil yang produktif serta mendorong meningkatnya penerimaan pemerintah.

Endrayana (2003) hubungan antara pengeluaran pemerintah dan penerimaan pemerintah memiliki arah pengaruh signifikan yang berbeda pada negara-negara sedang berkembang dalam membuat keputusan penganggaran. Dimana pemerintah di negara berkembang biasanya menghadapi adanya *budget constraint* yang lebih besar dibanding dengan negara-negara lain. Pemerintah harus membuat suatu keputusan di antara dua kemungkinan, yaitu menaikkan penerimaan pajak atau mengurangi pengeluaran untuk menutupi defisit fiskal dan sebagai usaha untuk penyesuaian dalam operasi fiskalnya.

Narayan dan Narayan (2006) menyatakan bahwa terdapat tiga alasan keterkaitan antara penerimaan dan pengeluaran pemerintah. Alasan pertama, jika hipotesis “pendapatan dan belanja” berlaku, maka defisit anggaran dapat dihindari dengan menerapkan kebijakan-kebijakan pemerintah yang dapat mendorong kenaikan penerimaan pemerintah. Alasan kedua, jika kausalitas dua arah antara penerimaan dan pengeluaran tidak berlaku, maka keputusan penerimaan pemerintah dibuat secara independen berdasarkan pengeluaran pemerintah. Alasan ketiga, jika hipotesis pengeluaran-pendapatan berlaku, maka pemerintah harus membelanjakan dan membayar pengeluaran sebelum meningkatkan pendapatan.

Ginting (2010) juga menemukan bahwa pengeluaran pemerintah akan berpengaruh positif terhadap penerimaan pemerintah. Ketika alokasi dana pemerintah dilakukan dengan perencanaan yang tepat maka penerimaan pemerintah akan semakin meningkat. Pembangunan infrastruktur akan memberikan pemasukan dalam bentuk pajak kepada pemerintah. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pengeluaran memiliki hubungan positif terhadap penerimaan pemerintah dalam jangka panjang, akan tetapi dalam jangka pendek pengeluaran tidak memiliki hubungan terhadap penerimaan pemerintah.

6. Kausalitas antara Pengeluaran Pemerintah dan PDRB

Pengeluaran pemerintah merupakan seperangkat kebijakan yang dibuat oleh pemerintah guna menghasilkan barang – barang publik yang dibutuhkan oleh masyarakat (Suindyah, 2011). Menurut Sukirno (2011) pengeluaran pemerintah (*government expenditure*) merupakan pemerintah membelanjakan uangnya untuk

membayai kebutuhan sehari – hari juga pembangunan daerah pengeluaran pemerintah.

Hal ini berarti pemerintah daerah dituntut untuk meningkatkan potensi yang ada dalam daerah itu sendiri guna mewujudkan laju pertumbuhan ekonomi daerah tersebut. Menurut Brilliantia Hanifah, A Kadir, dan Yulianita (2017) daerah yang ingin meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi membutuhkan campur tangan pemerintah guna mengatur dan mengawasi perekonomian suatu daerah. Menurut Saidah (2011) dalam teori organis menyatakan bahwa pendapatan perkapita suatu daerah berbanding lurus dengan pengeluaran pemerintah. Hal ini berarti jika pendapatan perkapita suatu daerah meningkat maka pengeluaran pemerintah meningkat juga.

Hasil penelitian yang tidak sejalan diperoleh oleh Hanafi dan Muhammad (2017) yang menemukan bahwa pengeluaran pemerintah tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Hasil penelitian tersebut menolak teori yang mengungkapkan pengeluaran pemerintah berpengaruh positif terhadap PDRB. Hal tersebut didorong alokasi pengeluaran pemerintah yang kurang efektif, sehingga target dan sasaran yang diharapkan pemerintah menjadi tidak tercapai.

Menurut Bailey (2011) mengungkapkan bahwa ketika pertumbuhan ekonomi sebuah negara mengalami peningkatan maka akan sejalan dengan peningkatan pengeluaran pemerintah baik pengeluaran yang dikeluarkan secara langsung atau pun tidak langsung. Meningkatnya PDRB menunjukkan pemerintah memiliki surplus pendapatan yang akan membantu pengeluaran mereka yang ditujukan kembali untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi kembali. Dengan

demikian peneliti menyimpulkan bahwa PDRB memiliki hubungan positif dengan pengeluaran pemerintah.

Temuan yang sejalan juga diperoleh Sitaniapessy (2019) yang mengungkapkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang diamati dari PDRB tidak saja dipengaruhi oleh besarnya pengeluaran pemerintah akan tetapi juga dapat dipengaruhi oleh situasi politik hingga keamanan sebuah negara. Dalam hal ini pemerintah juga dapat menambah pengeluarannya dengan menggunakan dana yang tidak bersumber dari pendapatan langsung mereka akan tetapi juga dapat diambil dari dana hibah dan sebagainya

Selanjutnya hasil penelitian yang sejalan juga diperoleh Rusli dan Risna (2019) yang menemukan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak mempengaruhi besarnya pengeluaran pemerintah. Temuan tersebut menunjukkan bahwa tidak selamanya pengeluaran pemerintah akan mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi yang diamati dari besaran PDRB, selain itu didalam penelitian yang sama pertumbuhan ekonomi juga tidak dapat menjadi dasar untuk meningkatkan pengeluaran pemerintah.

7. Kausalitas antara Penerimaan Pemerintah dan PDRB

Dalam mengukur keberhasilan pembangunan suatu negara dibutuhkan beberapa indikator, salah satunya adalah pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi terjadi jika adanya pergeseran barang dan jasa yang di hasilkan oleh suatu daerah dan mengakibatkan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

PDRB memiliki hubungan dengan kegiatan perekonomian. Artinya, *product domestic regional bruto* (PDRB) tidak dapat dipisahkan dengan kegiatan perekonomian suatu daerah. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya peningkatan

yang terjadi pada PDRB menyebabkan peningkatan pada kegiatan perekonomian suatu daerah.

Peningkatan penerimaan juga menjadi sumber alasan bahwa dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi, dapat dilihat didalam peningkatan penyediaan barang publik oleh pemerintah. Dengan demikian *Wagner's Law* berlaku, dimana peningkatan PDRB akan mengakibatkan pengeluaran pemerintah meningkat. Sehingga dapat mempunyai efek didalam peningkatan penerimaan pemerintah Parmawati (2010).

Hasil penelitian Hanafi dan Muhammad (2017) yang menemukan bahwa penerimaan pemerintah tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi yang diukur dengan *product domestic regional bruto*. Hal tersebut disebabkan tidak efektifnya alokasi dana yang bersumber dari pengeluaran pemerintah sehingga kontribusi pengeluaran tidak terlihat untuk mendorong meningkatnya pertumbuhan ekonomi.

Bailey (2011) penerimaan pemerintah dapat berasal dari berbagai sumber mulai dari sektor pajak, hingga dari pembayaran hutang. Ketika PDRB yang dimiliki oleh sebuah negara mengalami peningkatan menunjukkan kegiatan produksi secara agregat dari seluruh warna negara juga mengalami peningkatan. Dimana untuk setiap pendapatan personal atau pun yang dibawah corporate tentu akan dikenakan pajak, sehingga akan menambah penerimaan pemerintah serta dapat membantu pemerintah untuk melakukan pengeluaran rutin.

Temuan yang sejalan juga diperoleh Sitaniapessy (2019) yang mengungkapkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang diamati dari PDRB tidak saja dipengaruhi oleh besarnya penerimaan pemerintah akan tetapi juga dapat

dipengaruhi oleh situasi politik hingga keamanan sebuah negara. Temuan tersebut juga mengisyaratkan bahwa peningkatan PDRB tidak selalu menjadi indikasi peningkatan penerimaan pemerintah karena adanya faktor hutang negara yang jatuh tempo atau adanya pengeluaran yang sifatnya tiba tiba yang harus dikeluarkan pemerintah seperti biaya kemanusiaan akibat bencana, wabah penyakit dan sebagainya.

Selanjutnya hasil penelitian yang sejalan juga diperoleh Rusli dan Risna (2019) yang menemukan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak mempengaruhi besarnya penerimaan pemerintah, hal tersebut terjadi karena penerimaan pemerintah juga dapat berasal dari pembayaran hutang negara lain, pinjaman luar negeri yang dialokasikan untuk kegiatan produktif, hingga dana bantuan dan hibah.

B. Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Abu-Eideh (2015)	<i>Causality Between Public Expenditure and GDP Growth In Palestina : An Econometric Analysis of Wagner's Law</i>	1. Terdapat hubungan jangka panjang antara pengeluaran dan PDB di Palestina. 2. Terdapat hubungan kausalitas dua arah antara pengeluaran dan PDB.
2.	Lukovic and Grbic (2014)	<i>The Causal Relationship Between Government Revenue and Expenditure in Serbia</i>	Terdapat hubungan kausal searah antara penerimaan pemerintah dengan pengeluaran pemerintah di Serbia.
3.	Santi <i>et al.</i> , (2018)	Analisis Kausalitas Pengeluaran Pemerintah, Investasi, dan Tenaga Kerja Terhadap PDRB SWP	Adanya hubungan kausalitas dua arah antar variabel pengeluaran pemerintah dan PDRB, investasi dan PDRB,

		Jember dan Sekitarnya.	tenaga kerja dan PDRB.
4.	Elyasi and Rahimi (2012)	<i>The Causality Between Government Revenue and Government Expenditure in Iran</i>	Terdapat kausalitas dua arah antara penerimaan pemerintah dan pengeluaran baik dalam jangka panjang maupun jangka pendek di Iran.
5.	Mehrara <i>et al.</i> (2011)	<i>Government Revenue and Government Expenditure in Asian Countries: Panel Cointegration and Causality</i>	Terdapat hubungan kausalitas dua arah antara penerimaan pemerintah dan pengeluaran pemerintah.
6.	Saifuddin (2016)	Analisis Kausalitas Penerimaan dan Pengeluaran Pemerintah di Provinsi Aceh (Studi Kasus 2011-2014) dengan Metode <i>Granger Causality</i>	Melakukan penelitian dengan beberapa model. Tetapi model 4 dikatakan lebih efektif. Hasil dari model 4 menunjukkan bahwa terjadi kausalitas penerimaan dan pengeluaran dengan signifikansi 5 persen.
7.	Wulansari (2009)	Kausalitas antara Pegeluaran Pemerintah Daerah dan PDRB di Jawa Timur Periode 1977 – 2004	Adanya hubungan kausalitas dua arah antara pengeluaran pemerintah daerah dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).
8.	Eita and Mbazima (2008)	<i>The Causal Relationship Between Government Revenue and Expenditure in Namibia.</i>	Terdapat kausalitas searah dari penerimaan pemerintah men pengeluaran pemerintah.
9.	Mpundu <i>et al.</i> (2019)	<i>Effect of Public Expenditure on Gross Domestic Products in Zambia from 1980-2017: An ARDL Methodology Approach</i>	Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat hubungan jangka panjang antara pengeluaran pemerintah dan PDB.

10.	Baniata <i>et al.</i> (2017)	<i>The Relationship between Government Expenditure and GDP: Empirical Testing og Wagner's Law in the Jordanian Economy.</i>	Terdapat hubungan kausal jangka pendek yang dimulai dari PDB menuju pengeluaran pemerintah.
11.	Sahed <i>et al.</i> (2020)	<i>The Relationship between Government Expenditures and Revenues in Algeria During the Period (1990-2019): Granger Causality Approach</i>	Hasil menunjukkan bahwa ada hubungan kausal searah antara penerimaan pemerintah dengan pengeluaran pemerintah yang berjalan dari penerimaan pemerintah ke pengeluaran.
12.	Al-Zeaud (2015)	<i>The Causal Relationship between Government Revenue and Expenditure in Jordan</i>	Hasil empiris menunjukkan bahwa kausalitas dua arah berjalan antara pendapatan dan pengeluaran.
13.	Mehrara and Rezaei (2014)	<i>The Relationship between Government Revenue and Government Expenditure in Iran</i>	Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat kausalitas searah antara penerimaan dan pengeluaran pemerintah yang berjalan dari penerimaan ke pengeluaran.
14.	Ali and Syah (2012)	<i>The Causal Relationship Between Governement Expenditure and Revenue in Pakistan</i>	Tidak tedapat hubungan kausal jangka panjang ataupun pendek antara penerimaan pemerintah dan pegeluaran pemerintah.
15.	Anne Sere and Choga (2017)	<i>The causal and cointegration relationship between government revenue</i>	Tidak terdapat hubungan kausalitas antara penerimaan pemerintah dan

		<i>and government expenditure</i>	pengeluaran pemerintah di Afrika Selatan.
16.	Dey (2018)	<i>Relationship between Export Revenue and Gross Domestic Product in Bangladesh: An Econometric Analysis</i>	Terdapat hubungan kausalitas dua arah jangka panjang ataupun pendek antara penerimaan ekspor dan PDB.
17.	Diacon and Maha (2015)	<i>The Relationship between Income, Consumption and GDP: A Time Series, Cross-Country Analysis</i>	Terdapat hubungan antara pendapatan, tingkat konsumsi dan PDB.

C. Kerangka Konseptual

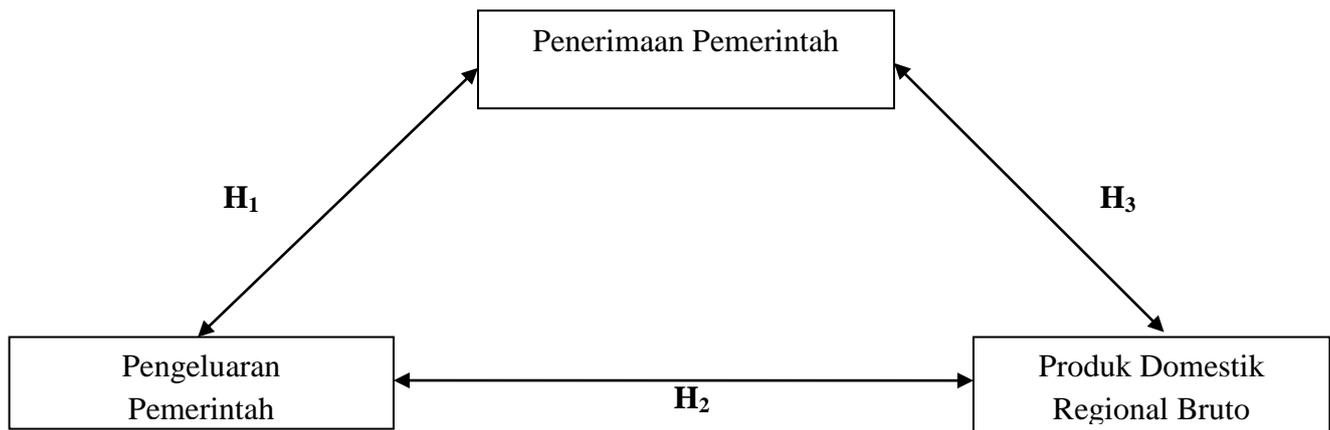
Kerangka konseptual merupakan konsep menjelaskan, mengungkapkan dan menentukan persepsi ketekaitan antar variabel yang diteliti dalam suatu penelitian berdasarkan latar belakang, rumusan masalah, dan keterkaitan hubungan antar variabel yang diteliti berdasarkan teori yang dijelaskan. Kerangka penelitian bertujuan sebagai pedoman dalam melakukan penelitian.

Adapun yang dibahas dalam penelitian ini adalah hubungan timbal balik antar variabel. Penelitian ini memiliki 3 variabel yaitu penerimaan pemerintah daerah, pengeluaran pemerintah daerah, dan PDRB Provinsi di Indonesia. Yang pertama kausalitas variabel penerimaan pemerintah daerah dengan variabel pengeluaran pemerintah daerah. Ketika penerimaan pemerintah daerah meningkat maka pengeluaran pemerintah daerah juga akan meningkat. Begitupun sebaliknya, ketika pengeluaran pemerintah maka penerimaan pemerintah juga akan meningkat. Hal ini disebabkan karena pemerintah melakukan sinkronisasi fiskal.

Sinkronisasi fiskal terjadi ketika keputusan perubahan sisi penerimaan dan sisi pengeluaran disesuaikan dengan tuntutan masyarakat.

Sejalan dengan hipotesis diduga terdapat kausalitas variabel pengeluaran pemerintah daerah dengan variabel PDRB. Ketika pengeluaran pemerintah daerah meningkat maka PDRB juga akan meningkat. Begitupun sebaliknya, ketika PDRB meningkat maka pengeluaran pemerintah daerah juga akan meningkat. Hal ini disebabkan karena pertumbuhan ekonomi akan menuntut peningkatan penyediaan barang publik oleh pemerintah. Artinya, peningkatan PDRB akan mengakibatkan pengeluaran pemerintah meningkat.

Selain itu sejalan dengan hipotesis diduga terdapat kausalitas antara variabel penerimaan pemerintah daerah dengan variabel PDRB. Ketika penerimaan pemerintah daerah meningkat maka PDRB juga akan meningkat. Begitupun sebaliknya, ketika PDRB meningkat, maka penerimaan pemerintah daerah juga akan meningkat. Hal ini disebabkan karena ketika penerimaan pemerintah daerah meningkat maka pengeluaran pemerintah daerah juga akan meningkat, hal ini disebabkan adanya peningkatan biaya pembangunan publik. Artinya, peningkatan PDRB akan berdampak pada peningkatan kegiatan ekonomi terutama di sektor riil dan dunia usaha pada umumnya. Peningkatan sektor tersebut akan membawa pengaruh terhadap peningkatan penerimaan pemerintah melalui perpajakan, karena bergerakinya perekonomian sehingga aktivitas dunia usaha mengalami peningkatan dan memberikan keuntungan yang meningkat bagi perusahaan. Berdasarkan penjelasan diatas dapat dilihat dalam kerangka konseptual secara sistematis dibawah ini:



Gambar 2.1
Kerangka Konseptual

D. Hipotesis Penelitian

Sebagai jawaban sementara dari permasalahan yang dikemukakan, maka dapat dibuat hipotesis sebagai berikut :

1. Terdapat hubungan kausalitas antara penerimaan pemerintah dengan pengeluaran pemerintah Provinsi di Indonesia wilayah barat 2010-2019.
2. Terdapat hubungan kausalitas antara penerimaan pemerintah dengan pengeluaran pemerintah Provinsi di Indonesia wilayah timur 2010-2019.
3. Terdapat hubungan kausalitas antara pengeluaran pemerintah dengan produk domestik regional bruto Provinsi di Indonesia wilayah barat 2010-2019.
4. Terdapat hubungan kausalitas antara pengeluaran pemerintah dengan produk domestik regional bruto Provinsi di Indonesia wilayah timur 2010-2019.
5. Terdapat hubungan kausalitas antara penerimaan pemerintah dengan produk domestik regional bruto Provinsi di Indonesia wilayah barat 2010-2019.
6. Terdapat hubungan kausalitas antara penerimaan pemerintah dengan produk domestik regional bruto Provinsi di Indonesia wilayah timur 2010-2019.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Sesuai dengan analisis dan pembahasan hasil pengujian hipotesis maka diajukan beberapa kesimpulan penting yaitu:

1. Terdapat hubungan kausalitas antara penerimaan pemerintah daerah dengan pengeluaran pemerintah daerah pada 18 provinsi di wilayah barat Indonesia.
2. Terdapat hubungan kausalitas antara penerimaan pemerintah daerah dengan pengeluaran pemerintah daerah pada 15 provinsi di wilayah timur Indonesia.
3. Tidak terjadi hubungan kausalitas antara penerimaan pemerintah daerah dengan PDRB pada 18 provinsi di wilayah barat Indonesia tetapi terdapat hubungan searah antara PDRB per kapita dengan penerimaan pemerintah.
4. Tidak terjadi hubungan kausalitas antara penerimaan pemerintah daerah dengan PDRB pada 15 provinsi di wilayah timur Indonesia tetapi terdapat hubungan searah antara PDRB per kapita dengan penerimaan pemerintah.
5. Tidak terjadi hubungan kausalitas antara pengeluaran pemerintah daerah dengan PDRB pada 18 provinsi di wilayah barat Indonesia tetapi terdapat hubungan searah antara PDRB per kapita dengan pengeluaran pemerintah.
6. Tidak terjadi hubungan kausalitas antara pengeluaran pemerintah daerah dengan PDRB pada 15 provinsi di wilayah timur Indonesia tetapi terdapat hubungan searah antara PDRB per kapita dengan pengeluaran pemerintah.

B. Saran

Berdasarkan kepada kesimpulan yang dihasilkan dalam penelitian ini, maka dapat diajukan beberapa saran yang tentunya dapat memberikan manfaat bagi:

1. Pemerintah pada 33 provinsi di Indonesia harus melakukan perencanaan yang baik dalam mengalokasikan pengeluaran pemerintah, agar proses alokasi pengeluaran menjadi lebih efektif dan tepat sasaran sehingga dapat mendorong meningkatnya penerimaan pemerintah atau pun *product domestic regional bruto*.
2. Bagi pemerintah harus mencoba melakukan penghematan dan mendorong kemudahan dalam proses perizinan serta berusaha mendorong iklim ekonomi, politik dan keamanan yang kondusif sehingga sektor riil dan investasi berkembang sehingga mendorong meningkatnya *product domestic regional bruto* serta penerimaan pemerintah.
3. Peneliti dimasa mendatang diharapkan mencoba mencari variabel lainnya yang juga mempengaruhi *product domestic regional bruto*, penerimaan pemerintah dan pengeluaran pemerintah yang tidak digunakan dalam penelitian ini seperti disparitas pendapatan, kualitas hidup masyarakat dan sebagainya. Saran tersebut penting untuk meningkatkan ketepatan dan akurasi hasil penelitian yang diperoleh dimasa mendatang.
4. Bagi peneliti dimasa mendatang juga disarankan untuk menggunakan analisis data panel lainnya seperti menggunakan analisis regresi data panel atau menggunakan error corrected model (ECM). Saran tersebut penting untuk meningkatkan ketepatan dan akurasi hasil penelitian yang diperoleh dimasa mendatang.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu-Eideh, Omar Mahmoud. 2015. "Causality Between Public Expenditure and GDP Growth In Palestine : An Econometric Analysis Of Wagner ' s Law." *Journal of Economics and Sustainable Development* 6(2):189–200.
- Adi, Priyo Hari. 2008. "Relevansi Transfer Pemerintah Pusat Dengan Upaya Pajak (Studi Kasus: Pemerintah Kabupaten Dan Kota Se- Jawa)." *The 2nd National Conference Faculty of Economics Widya Mandala Ctholic University*.
- Al-Zeaud, H. A. 2015. "The Causal Relationship between Government Revenue and Expenditure in Jordan." *International Journal of Management and Business Research* 5(2):117–27. doi: 10.1515/ethemes-2014-0009.
- Ali, R., and M. Syah. 2012. "The Causal Relationship Between Government Expenditure and Revenue in Pakistan." *Interdisciplinary Ournal of Contemporary Research in Business* 3(12):323–29.
- Anne Sere, Kebitsamang, and Ireen Choga. 2017. "The Causal and Cointegration Relationship Between Government Revenue and Government Expenditure." *Public and Municipal Finance* 6(3):23–32. doi: 10.21511/pmf.06(3).2017.03.
- Ariefianto, Moch Doddy. 2012. *Ekonometrika, Esensi Dan Aplikasi Dengan Menggunakan Eviews*. Jakarta: Erlangga.
- Bailey, Stephen J. 2011. *Public Sector Economics Theory, Policy and Practice*. Vol. 44.
- Baniata, Atef Khalil, Financial Economies, and Ahmad Al-waked. 2017. "The Relationship between Government Expenditure and GDP : Empirical Testing of Wagner ' s Law in the Jordanian Economy." *Journal of Economic Cooperation and Development*.
- Brillianta Hanifah, Nadine, Syamsurijal A Kadir, and Anna Yulianita. 2017. "Analisis Kausalitas Antara Pengeluaran Pemerintah Dan Pertumbuhan Ekonomi Di Pulau Sumatera." *Jurnal Ekonomi Pembangunan* 15(1):15–34. doi: 10.29259/jep.v15i1.8779.
- Budiharsono. 2013. *Wilayah Domestik Dan Regional Produk Domestik Regional Bruto*. 1st ed. Jakarta: Bumi Aksara.
- Dey, Sudip. 2018. "Relationship between Export Revenue and Gross Domestic Product in Bangladesh: An Econometric Analysis." *Asian Business Review* 8(1):7–12. doi: 10.18034/abr.v8i1.2.
- Diacon, Paula-Elena, and Liviu-George Maha. 2015. "The Relationship between Income, Consumption and GDP: A Time Series, Cross-Country Analysis." *Procedia Economics and Finance* 23:1535–43. doi: 10.1016/s2212-5671(15)00374-3.